

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan KUMKM

- ▶ Pembangunan KUMKM
- ▶ Tantangan dalam Membangun KUMKM
- ▶ Arah strategi, kebijakan dan program pembangunan KUMKM

Pembangunan KUMKM

Pemerintah mempunyai kebijakan yang jelas dlm Pembangunan KUMKM:

- Secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas **kekeluargaan** (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas **demokrasi** ekonomi dlm pembangunan ekonomi (pasal 33 ayat 4) → Koperasi

- Ada ***affirmative policy*** (kebijakan yg berpihak) pada KUMKM (Adanya kesadaran dan perhatian thd nasib ekonomi rakyat)→
 - a. agenda pembangunan dewasa ini dan ke depan, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, juga kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan → mewujudkan masyarakat adil dan makmur → **Pemberdayaan KUMKM** merupakan bagian integral

Pembangunan KUMKM

b. tercermin dalam strategi pembangunan nasional, Pemberdayaan KUMKM dalam rangka melaksanakan *triple track strategy*. *pro poor; pro growth* dan *pro job*:

→ Berkaitan langsung dg peningkatan sebagian besar kesejahteraan rakyat Indonesia (*pro poor*)

→ Penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nas (*pro growth*)

→ Mempunyai peran dominan dlm perluasan dan penyerapan tenaga kerja (*pro job*)

Pembangunan KUMKM

Pembangunan Koperasi

- Koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat: harus menjadi **badan usaha efisien; gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat.**
- Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri dan andal: **harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya.**
- Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang: **didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh.**

- ▶ Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial



- ▶ berlandaskan demokrasi, (memiliki jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan)



- ▶ Harus dikembangkan dalam wadah pelaku ekonomi lain, seperti BUMN dan swasta, sehingga ketiga wadah pelaku ekonomi tersebut dijamin keberadaannya dan memiliki hak hidup yang sama di negeri ini.

- ▶ pengertian koperasi ke dalam konsep sokoguru perekonomian kita?



- ▶ “jika kita ingin membangun pengertian dalam lingkup konsep sokoguru perekonomian nasional: intinya adalah bagaimana mengupayakan agar jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan tersebut secara substantif berada dan mewarnai kehidupan dari ketiga wadah pelaku ekonomi (koperasi, BUMN dan swasta).”
- ▶ membangun sokoguru perekonomian nasional berarti →
 - membangun badan usaha koperasi yang tangguh,
 - menumbuhkan badan usaha swasta yang kuat dan
 - mengembangkan BUMN yang mantap secara simultan dan terpadu dengan bertumpu pada tiga strategi pembangunan, yakni *pro-growth*, *pro-jobs*, dan *pro-poor* untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak.

Pembangunan KUMKM

- ▶ Tercermin dalam Visi Kemenkop dan UKM, yaitu: “Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan KUMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional”
- ▶ visi Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas, serta berkeadilan. Lantas, dokumen RPJPN 2005–2025 ini kemudian dituangkan ke dalam dokumen pembangunan lima tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN Tahap I 2004–2009, pembangunan ekonomi diarahkan pada tiga strategi, yakni *pro-growth*, *pro-jobs*, dan *pro-poor*.

Tantangan dalam Membangun KUMKM

Terdapat tiga tantangan besar yg perlu diantisipasi oleh ketiga wadah pelaku ekonomi, yaitu;

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam situasi proses globalisasi ekonomi yang makin meluas.
2. Mempercepat pemerataan yang makin mendesak mengingat 36,2 juta rakyat masih berada di bawah garis kemiskinan.
3. Memelihara kesinambungan kegiatan pembangunan yang stabil dan dinamis dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya berbagai kendala yang menghambat upaya kita menjawab kedua tantangan di atas.

- ▶ Untuk menjawab tantangan pembangunan di masa yang akan datang → meningkatkan dan memantapkan proses integrasi ketiga wadah pelaku ekonomi, yang dilandaskan atas jiwa dan semangat kekeluargaan dan kebersamaan dimana proses tersebut diperlukan untuk mengembangkan ketiga wadah pelaku ekonomi tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- ▶ Pada dasarnya ketiga wadah pelaku ekonomi mempunyai tanggung jawab bersama dalam menjawab tantangan pembangunan namun diperlukan pembagian kerja sebagai konsekuensi dari perbedaan ciri-ciri organisasi masing-masing pelaku ekonomi tsb dan dilihat dari tingkat efisiensi, masing-masing pelaku ekonomi mempunyai keunggulan komparatif sendiri-

- ▶ Koperasi dengan sifat–sifat khas berdasarkan prinsip kelembagaannya, nampak lebih efisien untuk melaksanakan secara langsung tugas pokoknya di bidang pemerataan. (tanpa mengabaikan tanggungjawab dan tugasnya di bidang pertumbuhan dan stabilitas).

→ yaitu sebagai wadah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah agar mereka dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan sekaligus dapat ikut menikmati hasil–hasilnya.

Tantangan dalam pembangunan KUMKM yang bersifat eksternal:

- (1) Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif,
- (2) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha,
- (3) Terbatasnya akses pasar,
- (4) Produk UMK yang sifat lifetime-nya pendek, dan
- (5) Implikasi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas

Tantangan pembangunan KUMKM yang bersifat internal antara lain adalah :

- (1) Kondisi obyektif SDM pelaku koperasi dan UMK yang masih rendah dan terbatas,
- (2) Manajemen yang tradisional,
- (3) Kurangnya permodalan,
- (4) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar.

Terdapat enam tantangan yg dihadapi oleh UMKM secara khusus dalam aspek pembiayaan:

1. Undang-Undang Perbankan hanya mengizinkan badan usaha bank yang dapat menghimpun dana masyarakat → tdk semua bank punya jaringan ke pedesaan
2. ketiadaan dasar hukum LKM yang memberikan perlindungan. Meski begitu, rintisan dasar hukum LKM telah dimulai melalui kebijakan bersama tiga menteri
3. Ketiga, pengawasan terhadap LKM masih minim
4. Keempat, pembinaan LKM.
5. Kelima, integrasi LKM ke dalam sektor keuangan.
6. Keenam, implementasi peran pemerintah dalam pengembangan keuangan mikro.

Tantangan Pembangunan Koperasi dalam menghadapi globalisasi antara lain:

- 1) Keterbatasan informasi pasar dan teknologi ;
- 2) kendala dalam akses permodalan ;
- 3) kapasitas SDM yang relatif rendah disebabkan faktor budaya yang membatasi ruang geraknya dalam berorganisasi ; dan
- 4) belum dikenalnya keberadaan koperasi dikalangan masyarakat.

Arah Strategi Kebijakan dan Program Pembangunan KUMKM

Visi RPJPN (2005-2025)

**Terciptanya masyarakat yang terlindungi,
sejahtera dan cerdas, serta berkeadilan.**

Visi RPJMN (2010-2014)

**Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis
dan berkeadilan.**

**Visi Kemenkop dan UKM dlm Renstra(2010-2014):
Mewujudkan KUMKM yang tangguh dan mandiri
sebagai Soko Guru perekonomian nasional**

Misi Kemenkop dan UKM:

- 1. Mengimplementasikan good governance**
- 2. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan KUMKM**
- 3. Meningkatkan daya saing KUMKM**
- 4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi KUMKM**
- 5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan**
- 6. kesadaran berkoperasi**

Arah kebijakan jangka panjang (2005–2025) pemberayaan KUMKM

- 1. Ditujukan pada pengembangan KUMKM yang berbasis iptek dan berdayasaing → untuk mencapai visi bangsa yg berdayasaing sesuai RPJPN,**
- 2. ditujukan pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka peningkatan produktivitas UMKM → untuk mencapai visi bangsa proses pembangunan yg merata dan berkeadilan**

***Arah kebijakan* jangka menengah (2010–2014) di bidang pemberdayaan KUMKM ditujukan pada:**

- 1. peningkatan akses pembiayaan bagi KUMKM khususnya KUR**
- 2. revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluha perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi serta calon anggota dan kader koperasi**
→ semua ditujukan pada peningkatan usaha masyarakat yg dapat menurunkan tingkat kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin sesuai dg *Affirmative policy* utk masy miskin: dlm rangka meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar dan kualitas kebijakan penganggulangan kemiskinan (RPJMN 2010–2014),

***Strategi* pemberdayaan KUMKM 2010–2014 diarahkan kepada: pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi
→dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian.**

▶ Sejalan dengan strategi pemberdayaan KUMKM, maka sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, pemberdayaan KUMKM melalui 5 fokus prioritas:

- 1. Peningkatan iklim usaha yg kondusif bagi KUMKM**
- 2. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif**
- 3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi KUMKM**
- 4. Peningkatan daya saing SDM KUMKM**
- 5. Penguatan Kelembagaan Koperasi**

Program Pemberdayaan KUMKM:

A. Program Teknis

- 1. Peningkatan iklim usaha yg kondusif bagi KUMKM**
- 2. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif**
- 3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi KUMKM**
- 4. Peningkatan daya saing SDM KUMKM**
- 5. Penguatan Kelembagaan Koperasi**

B. Program Generik

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis**
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Program dan Kegiatan:

1. Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM:

Prioritas pembangunan nasional:

- ▶ Penataan peraturan perundang-undangan terkait perkoperasiaa, LKM, pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produk dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna beserta ketentuan pelaksanaannya.**
- ▶ Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan yang merugikan Koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.**
- ▶ Pembentukan forum Koordinasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM.**

Proritas Kemenkop dan UKM:

- ▶ Peluasan penerapan penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan Kinerja Koperasi dan UMKM.
- ▶ Peningkatan koordinasi lintas pelaku tingkat nasional dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di dalam bidang kelembagaan.
- ▶ Peningkatan koordinasi lintas pelaku dalam penyelarasan upaya-upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tingkat nasional di bidang rekonstruksi usaha.
- ▶ Peningkatan koordinasi lintas pelaku dalam penyelarasan upaya-upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tingkat nasional di bidang pemasaran dan jaringan usaha.
- ▶ Peningkatan koordinasi lintas pelaku dalam penyelarasan upaya-upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM Bidang Produksi di tingkat nasional.
- ▶ Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SDM KUMKM.

2. Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Produksi

Prioritas pembangunan nasional:

- ▶ Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi Koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.
- ▶ Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewaguna usaha, penggadaian serta Lembaga Penjaminan Kredit dalam mendukung pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.
- ▶ Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi layanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.
- ▶ Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi.

Prioritas Kemenkop dan UKM:

- ▶ Pengembangan Pembiayaan dan Pinjaman Kredit serta pengembangan Sektor Strategi.
- ▶ Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi Koperasi dan UMKM, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.
- ▶ Penyediaan insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.
- ▶ Program Pembiayaan Dana Bergulir KUMKM.
- ▶ Pengembangan Pendanaan Koperasi dan UMKM Termasuk Penyediaan Dana Pelaku Usaha Mikro dan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Pembiayaan.
- ▶ Pengembangan dan Pengendalian simpan Pinjam Termasuk Pendirian Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KSP / KJKS dan Induk Pembiayaan LKM (APEC LKM).
- ▶ Pengembangan Permodalan, Kredit Program dan Skim Kredit Lainnya.

- ▶ Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan, Penerapan Kebijakan.
- ▶ Perpajakan, dan Sinergi Pembiayaan melalui anggaran daerah.
- ▶ Pengembangan Pembiayaan Pinjaman Kredit Termasuk Pendirian LPS Bagi Anggota KSP / KJKS.
- ▶ Penyuluhan blueprint Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan.
- ▶ Penyediaan Sistem Insentif Bagi Penerapan Standar Kualitas Produk dan Jasa yang di hasilkan Koperasi dan UMKM.
- ▶ Pengembangan Sistem Jaringan Pengamanan dan Perlindungan usaha bagi koperasi UMKM, termasuk advokasi hukum terkait persaingan usaha HAKI.
- ▶ Pengembangan jasa pendampingan dan konsultasi keuangan bagi koperasi dan UMKM.
- ▶ Dukungan sistem Insentif bagi penyedia jasa pengembangan dan penyelenggaraan pendampingan usaha bagi koperasi dan UMKM terkait aspek – aspek teknologi, manajemen, pemasaran, informasi, dan kerja sama usaha

3. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi KUMKM

Proritas pembangunan nasional:

- ▶ Penyediaan sistem Insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi berorientasi ekspor.
- ▶ Pengembangan dan penguatan sentra – sentra produk / kluster usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir.
- ▶ Dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk – produk yang berbasis rantai nilai, subkontrak, ahli teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi.
- ▶ Dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan pemasaran baik domestik maupun ekspor.
- ▶ Dukungan sistem insentif bagi penyediaan jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada sumber – sumber pembiayaan.

Proritas Kemenkop dan UKM:

- ▶ **Peningkatan peran UKM dalam pengembangan ekonomi daerah.**
- ▶ **Pengembangan sumberdaya koperasi dan UKM dalam peningkatan ekonomi kawasan.**
- ▶ **Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.**
- ▶ **Peningkatan Kapasitas Kerjasama dan Jaringan.**

4. Peningkatan Daya Saing SDM KUMKM

Prioritas pembangunan nasional:

- ▶ Penyusunan blueprint pengembangan kewirausahaan nasional yang di dukung pembenahan peranata kelembagaan
- ▶ Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui indikator tekhnologi dan bisnis, serta pola – pola pengembangan lainnya sesuai blueprint pengembangan kewirausahaan.
- ▶ Peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.
- ▶ Revitalitas, dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM

Proritas Kemenkop dan UKM:

- ▶ Peningkatan Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM melalui kerjasama luar negeri.**
- ▶ Pemahaman perkoperasian melalui pendidikan formal dan non formal.**
- ▶ Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM koperasi dan UMKM**
- ▶ Peningkatan monitoring dan evaluasi diklat koperasi dan UMKM**

5. Penguatan Kelembagaan Koperasi:

Prioritas pembangunan nasional:

- ▶ **Penyuluhan perkoperasian kepas masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh Koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi yang baik.**
- ▶ **Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum Koperasi.**
- ▶ **Penyediaan intensif dan fasilitas dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar Koperasi, termasuk pengembangan Koperasi sekuder.**
- ▶ **Peningkatan kafasitas kelembagaan Koperasi.**
- ▶ **Peningkatan kemampuan pembinaan Koperasi.**

Proritas Kemenkop dan UKM:

- ▶ Penyelenggaraan penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat.
- ▶ Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi dan UMKM
- ▶ Penyediaan intensif dan fasilitas dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar Koperasi, termasuk pengembangan Koperasi sekunder.
- ▶ Penguatan gerakan Koperasi untuk lebih berperan di dalam membangun kemandirian Koperasi.
- ▶ Meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah.

- 6. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya:**
- ▶ **Peleaksanaan Anggaran dan Penatausahaan dan Inventarisasi BMN.**
 - ▶ **Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan UMKM.**
 - ▶ **Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi.**
 - ▶ **Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Koperasi dan UMKM.**
 - ▶ **Perencanaan Penyuluhan Program dan Koordinasi.**
 - ▶ **Pengawasan.**
 - ▶ **Pemeliharaan (Langgana daya dan Jasa).**
 - ▶ **Kehumasan dan pendidikan pelatihan aparatur.**
 - ▶ **Dukungan pemberdayaan Koperasi dan UKM di daerah.**

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM.

- ▶ Penyelenggaraan Pengurusutamaan Geder Bidang Koperasi dan UMKM.**
- ▶ Pengembangan Pusdiklat Terpadu Peningkatan SDM Koperasi dan UKM di Cisarua Bogor.**
- ▶ Pengembangan Wisma SMEACO dan Rumah Dinas Pejabat Eselon I dan II Jend. Gatot Subroto.**
- ▶ Pengembangan Pusat Bisnis Koperasi dan UMKM Jl. MT. Haryono Kav.52–53 Jakarta Selatan.**
- ▶ Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor.**

selesai